

ANALISA LAPORAN AUDIT PEMERINTAH PROVINSI NTT

Maria Roberty Stevy Benyamin¹, Maria Prudensiana Leda Muga², Minarni A.

Dethan³.

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Indonesia

Email: Stevybenyamin@gmail.com

Article History

Received: 10-12-2025

Revision: 21-03-2026

Accepted: 03-04-2026

Published: 04-04-2026

Abstract. *This research method uses quantitative descriptive. This study aims to analyze data from the NTT Provincial Government audit reports and examine the impact of audit findings, non-compliance, and the effectiveness of audit recommendation follow-up, both partially and simultaneously, on the financial management performance of the NTT Provincial Government. The data used in this study is secondary data from the BPK's LHP on the NTT Provincial LKPD (2018-2023), IHPS Semesters I and II, and the Follow-up Monitoring Report on Audit Results. The data collection technique was carried out through a documentation study by downloading and reviewing the BPK's LHP available on the BPK's official website. The results of this study indicate that the financial performance of the East Nusa Tenggara Provincial Government shows a positive and consistent development pattern. This study also shows that audit findings and non-compliance have a negative impact on regional financial performance, while the effectiveness of follow-up actions has a positive impact.*

Keywords: *Audit Findings, Non-Compliance, Effectiveness of Follow-up Actions, Audit Ratio*

Abstrak.

Abstrak. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data laporan audit pemerintah Provinsi NTT dan menguji pengaruh temuan audit, ketidakpatuhan, dan efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari LHP BPK atas LKPD Provinsi NTT (2018-2023), IHPS Semester I dan II serta Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengunduh dan mengkaji LHP BPK yang tersedia diweb resmi BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan pola perkembangan yang positif dan konsisten. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa temuan audit dan ketidakpatuhan memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan regional, sementara efektivitas tindakan tindak lanjut memiliki dampak yang positif.

Kata Kunci: Temuan Audit, Ketidakpatuhan, Efektivitas Tindak Lanjut, Rasio Audit

How to Cite: Benyamin, M.R.S. et al. (2026). Analisa Laporan Audit Pemerintah Provinsi NTT. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal Economics and Business*, 6 (1), 8087-8097. [10.54373/ifi Jeb.v6i1.4746](https://doi.org/10.54373/ifi Jeb.v6i1.4746)

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel. Dalam rangka memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Badan Pemeriksa

Kuangan secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (Manuain, 2019). Laporan keuangan pemerintah dianalisis menggunakan metode perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dari sisi efektivitas, efisiensi, kemandirian, serta kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya (Halim, 2013). Untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah secara lebih obyektif, diperlukan pendekatan kuantitatif yang dapat mengukur tata kelola berdasarkan data audit. Aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu otonomi daerah yang pelaksanaannya menimbulkan hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, sehingga perlu adanya pengelolaan yang profesional, transparan, dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas serta *value for money* (efektif, efisien dan ekonomis) dan dibuat dalam system yang benar dalam menghadapi tantangan persaingan global. Sehingga tujuan dari penelitian yaitu menganalisis tren opini audit, mengidentifikasi tingkat ketidakpatuhan dan efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit serta menguji pengaruh temuan audit terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT.

KAJIAN TEORITIS

Good Governance

Penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin melalui adanya system pengendalian intern yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian Widodo & Sudarno (2017) menegaskan bahwa opini audit BPK dapat dijadikan tolak ukur penerapan *good governance*, karena audit tidak hanya menilai kewajaran laporan keuangan tetapi juga mengungkap ketidakpatuhan dan kelemahan pengendalian inern yang berpotensi menyebabkan kerugian Negara, teori ini menjadi kerangka utama dalam analisis laporan audit.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang transparan, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Penapan akuntabilitas publik bertujuan memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga mampu mencegah penyelewengan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penerapan teori akuntabilitas publik dalam penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana kualitas laporan keuangan Pemerintah Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mencerminkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat serta mendukung perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

Teori Agensi

Opini audit BPK dapat digunakan sebagai instrument untuk menilai apakah pemerintah daerah telah menjalankan fungsi agensinya secara akuntabel dan transparan (Masdiantini, 2016). Peran audit dalam konteks teori agensi sangat penting, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, serta menekan peluang terjadinya kecurangan (fraud) dan ketidakpatuhan (Widyaningrum, 2021).

Konsep Audit Pemerintah

Penelitian Widyaningrum (2023) menegaskan bahwa audit pemerintah tidak hanya sebagai mekanisme pertanggung jawaban, tetapi juga sebagai instrument pengendalian eksternal untuk memperkuat *good governance* dan mencegah moral hazard dalam pengelolaan keuangan daerah

Konsep Rasio Audit

Penggunaan rasio audit membantu mengidentifikasi tren ketidakpatuhan dan kinerja tindak lanjut, sehingga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas daerah (Widyaningrum, 2021).

METODE

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengunduh dan mengkaji LHP BPK yang tersedia diweb resmi BPK. Jenis data termanifestasi dalam bentuk informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bilangan dan angka dengan sumber data LHP BPK atas LKPD Provinsi NTT (2018-2023), IHPS Semester I & II, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan data temuan audit, tingkat ketidakpatuhan, dan efektivitas tindak lanjut secara statistik sederhana (rata-rata, persentase, tren). penelitian ini mengisi celah penelitian sebelumnya dengan fokus khusus pada Provinsi NTT periode

2021–2023, serta menggabungkan tiga variabel audit utama yang secara simultan diuji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Audit

Tabel 1. Temuan Audit

Tahun	Nilai Audit	Temuan	Total Belanja Daerah	Rasio Temuan Audit
2021	12.345.000.000		5.600.000.000.000	0,22%
2022	9.875.000.000		6.100.000.000.000	0,16%
2023	8.150.000.000		6.400.000.000.000	0,13%

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil penelitian dalam tabel 1 pada tahun 2021 nilai temuan audit sebesar Rp 12,34 miliar dengan rasio 0,22% terhadap total belanja daerah. Angka ini menunjukkan bahwa pada awal periode penelitian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian pengeluaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah. BPK mencatat beberapa temuan terkait pengelolaan asset tetap dan efisiensi belanja modal. Tahun 2022 nilai temuan audit turun menjadi Rp 9,87 miliar dengan rasio 0,16%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran. Pemerintah Provinsi NTT mulai memperkuat system pelaporan dan pengawasan keuangan. Tahun 2023 nilai temuan audit Kembali menurun menjadi Rp 8,15 miliar (rasio 0,13%). Hasil audit BPK menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan pelaksanaan anggaran yang semakin efektif. Secara tahunan, tren penurunan rasio temuan audit memperlihatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan dan efektivitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai temuan audit mengalami penurunan tahun 2021 ke tahun 2023 mencerminkan peningkatan kualitas pengawasan, efisiensi pelaksanaan program, dan perbaikan pengendalian intern Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Ketidakpatuhan

Tabel 2. Ketidakpatuhan

Tahun	Nilai Ketidakpatuhan	Temuan	Nilai Audit	Temuan	Rasio Ketidakpatuhan
2021	5.120.000.000		12.245.000.000		41,46%
2022	3.820.000.000		9.875.000.000		38,70%

2023	2.750.000.000	8.150.000.000	33,74%
-------------	---------------	---------------	--------

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil pengelolaan data bahwa rasio ketidakpatuhan Tahun 2021 mencapai 41,46% hal ini menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap peraturan keuangan daerah, seperti ketidaksesuaian dalam pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset. Ini menandakan bahwa system pengawasan internal masih perlu diperkuat. Tahun 2022 rasio menurun menjadi 38,70%. Penurunan ini menggambarkan perbaikan dari hasil pembinaan oleh inspektorat BPK, serta peningkatan kepatuhan satuan kerja terhadap regulasi keuangan. Tahun 2023 rasio menurun lebih lanjut ke 33,74%, menunjukkan peningkatan disiplin administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan. Temuan ketidakpatuhan yang tersisa bersifat minor dan tidak material terhadap kewajaran laporan keuangan. Penurunan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil memperkuat tata kelola administrasi, dan mengurangi kesalahan procedural dalam pelaksanaan kegiatan.

C. Efektivitas Tindak Lanjut

Tabel 3. Efektivitas Tindak Lanjut

Tahun	Nilai Rekomendasi	Nilai Ditindaklanjuti	Efektivitas
2021	320	230	71,88%
2022	305	240	78,69%
2023	290	245	84,48%

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengelolaan data, efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan tren yang terus meningkat, Tahun 2021 tingkat efektivitas tindak lanjut sebesar 71,88%. Artinya, Sebagian besar rrekomendasi audit telah ditindaklanjuti, namun masih ada sekitar 28% rekomendasi yang belum terselesaikan, terutama terkait pengelolaan asset dan pertanggungjawaban belanja. Tahun 2022 efektivitas meningkat menjadi 78,69%. Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan progress positif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya terkait penguatan system akuntansi dan penertiban asset tetap. Tahun 2023 efektivitas mencapai 84,48%, menunjukkan peningkatan signifikan. Hampir seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti dengan hasil yang memadai. Capaian ini membuktikan adanya komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTT terhadap akuntabilitas punlik.

D. Kinerja Keuangan Daerah

Tabel 4. Kinerja Keuangan Daerah

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2021	1.750.000.000.000	1.580.000.000.000	90,29%	Cukup Efektif
2022	1.820.000.000.000	1.720.000.000.000	94,51%	Efektif
2023	1.900.000.000.000	1.850.000.000.000	97,37%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengelolaan data, rasio efektivitas PAD meningkat setiap tahun. Tahun 2021 berada pada kategori cukup efektif dengan rasio 90,29%, tahun 2022 rasio efektivitas meningkat menjadi 94,51% (efektif). Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam pemungutan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi layanan publik. Tahun 2023 mencapai 93,37% (sangat efektif). Tahun ini menjadi pencapaian tertinggi, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah berhasil meningkatkan sumber PAD secara maksimal dengan dukungan sistem informasi keuangan yang lebih baik. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi NTT dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah, serta menunjukkan bahwa pengelolaan PAD semakin efisien dan transparan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2021–2023, bahwa tiga variabel independen, temuan audit, ketidakpatuhan, dan efektivitas tindak lanjut terhadap hasil audit, memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan kinerja keuangan daerah, yang diukur melalui rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

A. Tren Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil audit menunjukkan penurunan dari IDR 12,34 miliar pada tahun 2021 menjadi IDR 8,15 miliar pada tahun 2023, dengan rasio terhadap belanja daerah menurun dari 0,22% menjadi 0,13%. Penurunan rasio ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan semakin rendahnya temuan audit, maka tingkat kesalahan, ketidakefisienan, dan ketidakberesan dalam pelaksanaan anggaran semakin rendah. Penurunan ini memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah, karena dana publik dapat digunakan secara lebih optimal dan sesuai dengan tujuan program. Penurunan proporsi temuan audit di Provinsi Nusa Tenggara Timur disertai dengan

peningkatan proporsi efektivitas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 90,29% menjadi 97,37% pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan inspeksi yang lebih efisien dapat mendorong perbaikan kinerja fiskal pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Masdiantini dan Ningsih (2016), yang menjelaskan bahwa semakin rendah temuan audit, semakin optimal kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa temuan audit memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah, artinya semakin rendah temuan audit, semakin tinggi efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

B. Tingkat Ketidakpatuhan dan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Audit oleh Pemerintah Provinsi NTT

Nilai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan menurun dari IDR 5,12 miliar pada tahun 2021 menjadi IDR 2,75 miliar pada tahun 2023, atau dari 41,46% menjadi 33,74% dari total temuan audit. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan peningkatan disiplin administratif di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketidakpatuhan yang tinggi biasanya terkait dengan kelemahan prosedural, kesalahan pelaporan, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tingkat ketidakpatuhan yang semakin rendah dapat disimpulkan kualitas laporan keuangan dan efisiensi penggunaan anggaran yang semakin baik. Penurunan tingkat ketidakpatuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejalan dengan peningkatan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencapai 97,37% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan terhadap peraturan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Temuan ini mendukung studi oleh Desi Fatimah (2015) dan Widyaningrum (2021), yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan memiliki dampak positif terhadap opini audit dan transparansi laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah, artinya tingkat ketidakpatuhan yang lebih rendah akan menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

C. Tingkat Ketidakpatuhan dan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Audit oleh Pemerintah Provinsi NTT

Efektivitas implementasi rekomendasi audit BPK telah meningkat secara signifikan, dari 71,88% pada tahun 2021 menjadi 84,48% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi NTT dalam menanggapi rekomendasi

BPK untuk perbaikan guna mengatasi berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi rekomendasi audit merupakan tolok ukur penting untuk menilai keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mekanisme pengendalian internal dan pengelolaan anggaran. Meningkatnya efektivitas implementasi rekomendasi, maka probabilitas temuan yang sama muncul pada periode berikutnya akan berkurang, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hubungan positif antara peningkatan efektivitas implementasi rekomendasi dan pertumbuhan rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa implementasi optimal rekomendasi audit memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Huseno (2025) dan Putra (2021), yang mengungkapkan bahwa efektivitas implementasi rekomendasi audit memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan opini audit dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi yang efektif dari rekomendasi audit memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan regional, karena hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menanggapi rekomendasi BPK dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kelemahan keuangan. Peningkatan pengawasan yang efektif, kepatuhan terhadap peraturan, dan implementasi yang konsisten terhadap rekomendasi audit telah berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian kinerja keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Nilai dan rasio temuan audit dalam Laporan Audit Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan penurunan selama tiga tahun terakhir. Temuan audit yang semakin rendah, maka semakin efisien dan transparan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Tingkatan ketidakpatuhan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, terutama melalui kegiatan bimbingan dan pengawasan internal. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan, di mana tingkat pelanggaran yang lebih rendah akan meningkatkan efektivitas dan kredibilitas keuangan daerah.

3. Tingkat efektivitas tindak lanjut memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan, karena mempercepat penyelesaian kelemahan sistem dan mendorong penggunaan anggaran yang efisien.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan pola perkembangan yang positif dan konsisten. Prestasi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan dan mengelola sumber daya fiskal secara efisien dan bertanggung jawab. temuan audit dan ketidakpatuhan memiliki dampak negatif terhadap kinerja.

REKOMENDASI

1. Bagi objek penelitian, perlunya penguatan berkelanjutan atas pengendalian internal, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi antara Inspektorat, BPK, dan OPD, termasuk pemanfaatan teknologi pengawasan seperti e-audit dan e-budgeting untuk mencegah ketidakwajaran anggaran.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan waktu, menambah variabel seperti skala pemerintah daerah atau faktor politik, serta menggunakan metode statistik inferensial guna memperoleh analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Desi Fatimah, (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Desi Fatimah, (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3.
- Fata & Maryani. (2025). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Instrumen Efisiensi Fiskal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan*.
- Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah (Ed. 3) Koran. Penerbit Salemba. *Akuntansi Keuangan Daerah*, 3.

- Huseno. (2025). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur*.
- Manuain, A. (2019). Praktik Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas untuk Kepercayaan Publik Atas Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Kasus Di Kota Kupang). *Skripsi*.
- Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan. In *Bongaya Journal For Research In Accounting* (Vol. 1).
- Masdiantini & Erawati. (2016a). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Masdiantini & Erawati. (2016b). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Masdiantini, P. R. , & E. N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Masdiantini, P. R. & E. N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E Jurnal Akuntansi Unud*.
- Mollet, J. A., & Klara, A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Hasi Pemeriksaan Bpk Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Lima Wilayah Adat Papua*.
- Nasly Betsyeba Mahalia Loni. (2021). Analisis Kemandirian Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 10.
- Nasution. (2023). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidapatuhan Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Audit Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2021*.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2.

- Oka Purnawan Widodo, S. (2017). *Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 6.
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2).
<https://doi.org/10.18202/Jamal.2018.04.9016>
- Saffabah Salsabila. (2022). *Analisis Pengaruh Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
<https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Widyaningrum. (2021). *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.